

RENCANA KERJA

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2023



**Jalan Urip Sumohadikusumo No. 1 Pemalang, Kode Pos 52312
Telp. (0284) 324657 Pemalang**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat tersusun.

Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemalang, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG,**



Drs. SLAMET MASDUKI, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641003 199303 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>LEMBAR PERNYATAAN</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	80
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	87
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	90
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	155
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	155
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	161
3.3. Program dan Kegiatan	164
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	200
BAB IV PENUTUP.....	243



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/2774/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Strategi Pengarusutamaan Gender;
 25. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 46. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 48. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
 49. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 55);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
 51. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 52. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 55);
 53. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 65);

54. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023;

55. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas mengumpulkan mengkompilasi data serta menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG,**



Drs. SLAMET MASDUKI, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
 Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kabupaten Pematang
 Nomor : 050/2774/2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Sekretaris	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada Dinas Sosial	Anggota	

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang		

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG,**



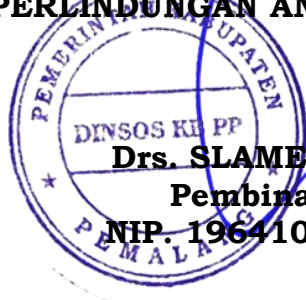
Drs. SLAMET MASDUKI, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG,**



Drs. SLAMET MASDUKI, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641003 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun 2 (dua) Dokumen Perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah *menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.*

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang *secara substansial penerjemahan* dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
- c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
- b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada rencana kerja Kementerian Sosial, BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dimana isu-isu strategis yang ada dalam dokumen perencanaan 3 (tiga) kementerian dan pemerintah provinsi dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan dibidang sosial tahun 2022 diarahkan pada Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, dengan prioritas pada:

- a. Penataan asistensi sosial: KIS, KIP dan KKS; dan
- b. Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH: Kebijakan tersebut sejalan dengan *Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong dengan tujuan ketiga Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam penurunan pengangguran.*

Kebijakan yang ditempuh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka mempercepat pembangunan Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk, adalah dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas, penyediaan sarana prasarana dan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan penggunaan MKJP dan pengurangan drop out, peningkatan jumlah dan kapasitas PKB/PLKB, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga didukung dengan penataan kelembagaan,

penyediaan data dan informasi kependudukan dan KB. Kebijakan tersebut diatas sejalan dengan Misi Ketiga dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Sedangkan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional sesuai dengan kebijakan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk trafficking, meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Ketiga dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Strategi Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 47. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 49. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
 51. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 55);
 52. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 53. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 55);
 54. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 65);

55. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023;
56. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan dan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026

RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang ini mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai jembatan penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2022 ini adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.
2. Memelihara sinergi dan konsistensi antara tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang.
3. Menjadi pedoman atau acuan resmi dalam pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya, serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.
5. Mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pencapaian target standar pelayanan minimum sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja serta Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Berisi uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dalam tabel yang berisi : Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Uraian Program dan Kegiatan.

BAB V: PENUTUP

Berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan sedang berjalan dapat dijelaskan bahwa secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian keuangan rata-rata 94,29% dan fisik/kegiatan rata-rata 100%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinsos KBPP tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pematang Jaya

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya										
1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1.06 Sosial										
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS		Persentase PMKS yang ditangani	Persen	25.53	12.76	62.69	491	15.32	15.32	60

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
Meningkatnya pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87.00	82.00	88.86	108	83.00	83.00	95
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan ketepatan laporan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP	Nilai	61.20	60.00	58.65	97.75	60.30	60.30	98.53
		Nilai IRB	Nilai	66.30	60.00	53.17	88.62	60.30	60.30	90.95

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	9	10	10	100	9	9	100
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	13	12	12	100	13	13	100
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Laporan	12	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang/bulan	30	33	33	100	33	30	100
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	0
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Dokumen	6	6	6	100	6	6	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	Persen	100	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah penyelenggaraan bimtek	Kali	34	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan/pe menuhan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis/bulan	7	7	7	100	7	7	100
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	1	8	16	200	2	1	100
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis/bulan	1	1	1	100	3	1	100
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Paket	1	1	1	100	4	1	100
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Paket	1	1	1	100	1	1	100
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	Buku	2	2	2	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kali	250	250	250	100	250	250	100
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	Unit	3	5	5	100	12	3	100
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	1	1	100	12	1	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	2500	2500	2500	100	2500	2,500	100
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah/ Bulan	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Bulan	18	12	50	417	97	18	100
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang	30	23	39	170	31	30	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	99	99	99	100	99	99	100
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	2	2	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS		Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	Persen	82.12	41.06	41.06	100	49.27	49.27	60.00
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	100	17	17	100	34	34	34.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	100	85.00	85.00	100	100	100	100.00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS		Persentase PMKS yang ditangani	Persen	25,53	12.76	62.69	491	15.32	15.32	60.01
Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS		Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	Persen	82,12	41.06	41.06	100	49.27	49.27	60.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	Persen	40,13	20.24	20.24	100	24.09	24.09	60.03
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah kecamatan yang memfasilitasi Izin undian	Kecamatan	14	-	-	-	14	14	100
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	Persen	40,13	20.24	20.24	100	24.09	24.09	60.03
1.06.02.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang meningkat kemampuannya	orang	372	257	257	100	10	372	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.02.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang meningkat kemampuannya	orang	14	14	14	100	14	14	100
1.06.02.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping PKH yang dibina	orang	275	712	712	100	20	275	100
		Jumlah Keluarga miskin yang terfasilitasi bantuan sosial	KPM	330	300		-	330	330	100
		Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendampingan	orang	730	664		-	730	730	100
1.06.02.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKSK yang kapasitasnya	orang	222	222		-	40	222	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.02.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah karang taruna dan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga (LK3) yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	13	190	190	100	230	13	100
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Presentase pemulangan warga negara migran yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	kali	5	2	2	100	2	5	100
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi	Persen	100	17	17	100	34	51	51.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	orang	239	239	100	42	239	339	141.84
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat permakanan	orang	1408	693	693	100	250	1,408	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Sandang	orang	1408	333	333	100	150	1,408	100
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat Alat Bantu	orang	100	118	118	100	70	100	100
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	150	30	30	100	30	150	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Fisik, mental, spiritual dan Sosial	orang	520	20	20	100	84	520	100
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Sosial	orang	525	-	-	-	39	525	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	orang	150	45	45	100	30	150	100
1.06.04.2.01.08	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	150	40	40	100	25	150	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah fasilitas Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	50	40	40	100	70	50	100
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah fasilitas Layanan kedaruratan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	150	15	15	100	42	150	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	150	25		-	10	150	100
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	150	40	40	100	90	150	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	orang	12	12	12	100	12	12	100.00
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Fasilitas Layanan data dan Pengaduan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	35	0	0	-	150	35	100
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Fasilitas Layanan kedaruratan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA	orang	35	10	8	80	15	35	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		diluar Panti Sosial.								
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Permakanan	orang	12	41	41	100	12	12	100
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan	orang	12	25	253	1,012	48	12	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Sandang								
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Alat Bantu	orang	5	5	5	100	5	5	100
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Persediaan Perbekalan Kesehatan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA	orang	12	20	20	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		diluar Panti Sosial.								
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	12	-	-	-	12	12	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	orang	12	11	11	100	12	12	100
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	100	-	-	-	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.02.10	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah	10	-	-	-	10	10	100
1.06.04.2.02.11	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	10	-	-	-	10	10	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	10	20	20	100	10	10	100
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	10	0		-	10	10	100
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah MOU / Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	mou	1	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Kabupaten Kota								
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemberian jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2	Persen	28.51	28.46	28.46	100	28.47	28.47	99.86
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	orang	10	10	10	100	10	20	33.33
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah penjangkauan anak terlantar setiap tahun	kali	25	10	10	100	10	25	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rujukan	orang	10	10	10	100	10	10	100
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah monev anak anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	kali	4	10	10	100	77	4	100
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terupdatenya Data Fakir miskin	dokumen	1	1	1	100	1	2	33.33
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melakukan verwal	desa	222	222	222	100	222	222	100
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kemiskinan terupdate	dokumen	1	1	1	100	1	1	100
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan bansos PKH, BPNT	Keluarga	210,589	210,589	210,589	100	210,589	210,589	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah anggota kube yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi	Kelompok	180	-	-	-	30	180	100
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan permakanan	orang	350	161	161	100	350	350	100
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat	orang	350	100	100	100	350	350	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		bantuan sandang								
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang tersedia	TITIK	3	3	3	100	3	3	100
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah kelompok rentan yang di tangani	orang	50	50	50	100	50	50	100
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	TITIK	3	3	3	100	3	3	100
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiap siagakan bencana	desa	4	4	4	100	4	4	100.00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga	kali	4	4	4	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		bencana								
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	JumlahKoordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kali	24	4	4	100	4	24	100
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang direhab	Jumlah	6	1	-	-	1	6	100
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pemeliharaan	tempat	6	1	1	100	1	6	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pengamanan	tempat	6	1	1	100	1	6	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Nilai	84.25	81.50	81.27	99.72	82.05	82	97.39
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan		Indeks PUG	Nilai	Utama	Utama		#VALUE!	Utama	#VALUE!	#VALUE!
2.08.02	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	5.6	5.0	5.0	100	5.2	5.2	92.86

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	Persen	100	70	70	100	80	80	80.00
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kebijakan implementasi PUG di desa tersusun (kebijakan)	dok	2	1	1	100	1	2	100
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota POKJA PUG yang meningkat perannya dalam PUG	tim	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen evaluasi APE yang tersusun	dok	1	1	1	100	1	1	100
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD Driver yang meningkat kapasitas dalam penyusunan dan pengawasan PPRG	Tim	1	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya dalam penyusunan PPRG	Desa	50	50	50	100	50	50	100
		Jumlah perencana OPD yang mampu menyusun PPRG	OPD	50	50	50	100	50	50	100
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah focalpoint yang meningkat kapasitasnya	unit	35	35	50	143		35	100
		Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap KKG	orang	100	150	150	100		100	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0.075	0.043	0.043	100	0.055	0	73.33
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang meningkat kapasitas di bidang politik	orang	50	100	100	100	50	50	100
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan rentan ekonomi yang didampingi bidang ekonomi	orang	50	20	20	100	25	50	100
		Jumlah perempuan di desa binaan yang didampingi program PPEP	orang	300	50		-	50	300	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah Perempuan korban kekerasan yang didampingi bidang ekonomi	orang	180	30		-	30	180	100
		Jumlah perempuan ODHIV yang didampingi bidang ekonomi	orang	120	20		-	20	120	100
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persen	67	40	40	100	47	47	70.15
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSGA dan organisasi wanita yang didampingi dalam pemberdayaan perempuan	kelompok	35	35	35	100	35	35	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Forum PUSPA yang meningkat kapasitasnya dan terfasilitasi dalam PUG	orang	50	50	50	100	50	50	100
		Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat responsif gender dan anak yang terfasilitasi dan meningkat kapasitasnya	kelompok	35	35		-	1	35	100
		Jumlah peta organisasi dan lembaga masyarakat yang responsif gender dan anak	dokumen	1	1		-	1	1	100
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE KKG yang dikembangkan	eksemplar/ Jenis	3	2	2	100	3	3	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)	Persen	7.3	7.8	6.72	86.15	7.7	14	197.53
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas trafficking yang terfasilitasi	orang	1	1	1	100	1	1	100
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman terkait perlindungan Nakerwan	orang	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	kelompok	14	14	-	14	14	100	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100.00	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	orang	100	30	50	167	20	100	100
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani di layanan rujukan	orang	50	90	90	100	60	50	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persen	100	72.05	72.05	100	78.17	78	78.17
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader PP-PA yang meningkat kapasitasnya	orang	50	50	50	100	30	50	100
		Jumlah Kader PP-PA yang terbina	orang	236	236	236	100	236	236	100
		Jumlah Kader PP-PA yang terfasilitasi dalam sosialisasi PPA	orang	100	100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pelayanan dan pendampingan korban yang terlatih	orang	50	30	30	100	50	50	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan spesifik perempuan korban kekerasan tersedia	orang	50	30	30	100	5	50	100
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi UPPA	orang	60	60	60	100	60	60	100
		Jumlah pengurus UPPA yang meningkat kapasitasnya	orang	60	60	60	100	60	60	100
		Jumlah UPPA terbina	orang	168	28	14	50	28	168	100
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pernikahan usia anak	Persen	4.00	5.32	5.32	100	5.00	5.00	125.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak	orang	120	20	20	100	30	120	100
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE tentang perlindungan anak bagi keluarga	buah	2,000	15	15	100	14	2,000	100
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pola asuh anak yang terbina	kel	10	5	5	100	30	10	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang berkembang untuk peningkatan kualitas keluarga	orang	22	22	22	100	25	22	100
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan yang terlatih Konvensi Hak Anak	orang	33	30	30	100	25	33	100
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga menjalin koordinasi dengan baik	orang	50	45	45	100	50	50	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	orang	38	35	35	100	30	38	100
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	Persen	92.59	74.07	74.07	100	77.7	152	163.92
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	75	12.5	12.5	100	25	38	50.00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi penyusunan data gender dan anak	orang	70	25	25	100	30	70	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak dalam bentuk data gender	dokumen	1	1	1	100	1	1	100
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Anak		Indeks KLA	Nilai	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	Persen	45.95	14.14	14.14	100	20.22	34	74.78
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelebagaan PHA	Persen	88.33	46.67	46.67	100	55.00	55.00	62.27

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan dunia usaha, media yang meningkat kapasitas tentang PPRA	orang	20	20	20	100	20	20	100
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang meningkat kualitasnya	orang	20	30	30	100	30	20	100
		Jumlah dokumen evaluasi KLA yang tersusun	kali	1	1	1	100		1	100
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	Persen	70.19	40.59	40.59	100	46.51	87	124.09
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kabupaten yang meningkat	orang	50	30	30	100	20	50	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		kapasitasnya								
		Jumlah forum anak kecamatan desa kelurahan yang terbentuk dan meningkat kapasitasnya	lembaga	1	1	1	100		1	100
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelana, Dekela, SRA yang meningkat kapasitasnya	lokasi	6	3	3	100	6	6	100
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelana dekela SRA yang dibina	lokasi	3	3	3	100	3	3	100
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan anak yang meningkat kapasitasnya tentang	orang	30	30	30	100	20	30	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		KHA								
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	Persen	210	10	10	100	20	30	14.29
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan anak tersosialisasikan	dokumen	50	30	30	100	40	50	100
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya	lembaga	50	50	50	100	10	50	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	Persen	66.15	27.69	27.69	100	35.38	35.38	53.48
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ABH yang terfasilitasi layanan	orang	15	15	15	100	15	15	100
		Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani	orang	50	50		-	50	50	100
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pelayanan dan pendampingan anak korban kekerasan dan ABH yang terlatih	orang	50	30	1	3	20	50	100
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KPA yang dikembangkan	media	2	2	2	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah satgas perlindungan anak sekolah terbentuk	orang	5	5	5	100	5	5	100
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan	Persen	88.33	46.67	46.67	100	55.8	55.8	63.17
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM yang tersedia saran dan prasarana	lembaga	14	14	14	100	14	14	100
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM PATBM yang meningkat kapasitasnya	orang	45	0	0	-	35	45	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM yang terbentuk dan meningkat kapasitasnya	lembaga	50	25	25	100	50	50	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
Menurunkan angka kelahiran		TFR	Angka	2.45	2.50		-	2,49	#VALUE!	#VALUE!
Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu		ASFR (15-49 tahun)	Angka	33.00	35.00		-	35.00	35.00	106.06
		Angka Prevalensi modern Contraceptive Prevalence (mCP)	Persen	24.3	22.5	70.93	315	23.00	23.00	94.65

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	10.05	10.10	12.14	120	10.09	10.09	100.40
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%	33.00	35.00	1.52	4.34	35.00	37	110.67
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat	%	6	5		-	5	5	83.33
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen kebijakan kependudukan yang disusun	dokumen	56			-	45	56	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan dok Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	OPD	56	45		-	45	56	100
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah SMA/SMK Membentuk Kelompok Kualisi Muda (Sekolah)	unit	1			-	1	1	100
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Desa Kelurahan Kelompok Kualisi Muda (Kelompok Remaja)	Desa/kel	222			-	222	222	100
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Desa Kelurahan Kelompok Kualisi Muda (Kelompok Remaja)	unit	4			-	4	4	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah OPD yang terlibat dan Program Bangga Kencana	OPD	13			-	13	13	100
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi pengumpulan Data Keluarga di Desa/Kelurahan	Desa/kel	222			-	222	222	100
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pen gawasan serta pelaporan KKBP	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi pengumpulan Data Keluarga di	Desa/kel		222	222	100	222	-	#DIV/0!

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Desa/Kelurahan								
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dok profil kependudukan yang disusun	dokumen	222			-	222	222	100
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Jumlah Kampung KB yang terbina	unit	51			-	51	51	100
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah kecamatan yang melaporkan di aplikasi SIGGA.	Kecamatan	14			-	14	14	100
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP	Jumlah dokumen pelaporan KKBP	dokumen	14			-	14	14	100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Modern CPRm	Persen	24.00	22.48	70.93	315.52	22.5	22.5	93.75

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	Persen	-	100	100	100	100	200	100
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Desa / Kelurahan Yang Tersuluh	des/kel	222			-	222	222	100
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kelompok yang mendapat KIE Program Bangga Kencana	Kelompok	222	222	222	100	222	222	100
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media KIE yang tersedia untuk Program KKBPK	jenis	28			-	28	28	100
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Kec yang melaksanakan mekanisme operasional KKBPK	Kecamatan	222			-	14	222	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPBPK yang terpenuhi operasional dan sarannya	Kecamatan	14			-	14	14	100
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB	%	100	100	100	100	100	100	100.00
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah masyarakat /keluarga sejahtera yang dibina melalui KB dengan pemberdayaan peran serta masyarakat di Desa	orang	237	237	237	100	237	237	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	Persen	70.56	81.61	86.37	106	70,16	#VALUE!	#VALUE!
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang menerima alkon MKJP (Faskes)	orang	25	25	25	100	25	25	100
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani KB MKJP	orang	550	300	-	-	20	550	100
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP yang terlayani	orang	14	14	-	-	14	14	100
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah PUS yang mendapat pembinaan KBKR	PUS	600	1400	1400	100	250	600	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Program Bangga Kencana	kec	14	14	14	100	14	14	100
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah kelompok KB pria yang mengikuti sosialisasi	Kelompok	80	80	80	100	40	80	100
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	Persen		100	100	100	100	100	100.00
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang terbina	Kelompok	2	2	2	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah masyarakat Masyarakat di Kampung KB yang meningkat kapasitasnya	orang	237	237	237	100	237	237	100
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	Persen	86.14	85.21	85.64	101	85.48	85.48	99.23
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah PIK- KRR berkembang dari tumbuh menjadi tegak	Kelompok	51	66	66	100	66	51	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Presentase kecamatan yang memiliki PIK KRR	Persen	100	100		-	100	100	100
		Jumlah masyarakat yang mendapat promosi khiba oleh kader di desa/kelurahan se-Kabupaten Pematang	orang	234	275		-	275	234	100
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana dan Prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi yang terfasilitasi	unit	9,813	9,813	9,813	100	2,950	9,813	100
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	kelompok	56	56	56	100	112	56	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	orang	138	56	56	100	42	138	100
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional Kader BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS yang terfasilitasi	klp	222	222	222	100	222	222	100
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi Produk UPPKS (Keg),	kali	1	1	1	100	1	1	100
			1 Keg	1	1		-	1	1	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program Genre	orang	75	34	34	100	34	75	100
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persetase Kecamatan ng di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	Persen	14	100		-	100	100	714.29
2.14.04.2.0204.2.01	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah pengelola kelompok Uppks yang terlatih	kelompok	14	14	56	400	14	14	100

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
2.14 . 1-06.2-08.2-14.06 . 04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Pengelola BKB Untuk Kegiatan Pemetaan Data Baduta	unit		222	222	100	222	-	-
2.14 . 1-06.2-08.2-14.06 . 04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Promosi Produk Uppks	kali	1	1	1	100		1	100
2.14 . 1-06.2-08.2-14.06 . 04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah remaja dalam program generasi berencana (GenRe) Terbina	orang	34	34	34	100	75	34	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari keseluruhan kegiatan yang berjumlah 16 (enam belas) Program 39 (tigapuluh sembilan) kegiatan 132 (seratus tigapuluh dua) sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam renja maupun renstra, dan terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang anggarannya di rasionalisasi sehingga target dan capaian kinerjanya dikoreksi atau dihilangkan dikarenakan kegiatan tersebut dihapus. Adapun kegiatan yang dihapus karena adanya rasionalisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
3. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
4. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
5. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
7. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
9. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
11. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
12. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
13. Pelayanan Penelusuran Keluarga pada Kegiatan Rehabitasu Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPSA di Luar Panti Sosial
14. Pemberian Layanan Rujukan

15. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan secara keuangan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang serapannya kurang dari 85% yaitu sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada tahun anggaran 2021 hanya sebesar 82,58% (adanya penghematan terhadap pemakaian Sumber daya air dan listrik) dan sub kegiatan dan Koordiasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/kota hal ini dikarenakan realisasi terdapat jumlah korban tindak kekerasan sebanyak 1 orang sedangkan yang ditargetkan sebanyak 10 orang

Permasalahan ini telah disikapi dengan pemberian informasi kepada pemegang kendaraan dinas dan pejabat pengurus barang/jasa untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa terhadap indikator kinerja aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka capaiannya dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwajibkan mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD yaitu urusan sosial yang masuk dalam kategori urusan pemerintah wajib pelayanan dasar serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang masuk dalam kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Pada tahun 2021 pencapaian indikator kinerja target akhir periode RPJMD dari ketiga urusan tersebut yaitu sebanyak 25 indikator, semuanya telah memenuhi target.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase PMKS yang ditangani	Persen		V		12,76	15,32	17,87	20,42	62,69	15,32	17,87	20,42	
2	Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	Persen		V		41,06	49,27	57,48	65,70	28,46	49,27	57,48	65,70	sesuai RPJMD perlu adanya perubahan pada Renstra untuk indikator ini belum menjadi IKU

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tenahi kebutuhan dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	V		V	17	34	57	68	100	34	57	68	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	V		V	85,00	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	TFR	Angka		V	V	2,50	2,49	2,48	2,47	2,49	2,49	2,48	2,47	
6	ASFR (15-49 Tahun)	Angka			V	35,00	35,00	35,00	34,00	35,00	35,00	35,00	34,00	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Persen			V	22,50	23,00	23,30	23,50	70,93	23,00	23,30	23,50	
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen			V	10,10	10,09	10,08	10,07	12,14	10,09	10,08	10,07	
9	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai		V		81,50	82,05	82,60	83,15	81,27	82,05	82,60	83,15	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Indeks PUG/ Penghargaan APE	Nilai		V		Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	sesuai RPJMD perlu adanya perubahan pada Renstra untuk indikator ini belum menjadi IKU

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Indeks KLA	Nilai		V		Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	sesuai RPJMD perlu adanya perubahan pada Renstra untuk indikator ini belum menjadi IKU
12	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%			V	5,00	5,20	5,40	5,40	1,62	5,20	5,40	5,40	
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%			V	0,13	0,12	0,11	0,10	0,13	0,12	0,11	0,10	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%			V	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	IKM	Nilai		V		82,00	83,00	84,00	85,00	88,86	83,00	84,00	85,00	
16	Nilai SAKIP	Nilai			V	60,00	60,30	60,50	61,00	58,65	60,30	60,50	61,00	
	Nilai IRB	Nilai			V	60,00	60,30	61,00	61,30	53,17	60,30	61,00	61,30	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Pematang Jaya, maka perlu upaya penanganan yang optimal terhadap PMKS dengan mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga upaya pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Masih rendahnya cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Pematang Jaya antara lain disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS. Jumlah PSKS di Kabupaten Pematang Jaya tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

Sedangkan pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditemui masalah adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu posisi Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pematang Jaya dibandingkan dengan daerah sekitar pada posisi paling rendah sehingga terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, beberapa permasalahan yang ada antara lain anggaran yang ada dalam kegiatan keluarga berencana semakin berkurang, sehingga akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang murah juga rendah. Disamping itu keterbatasan jumlah petugas penyuluh belum bisa mencapai 1 desa 1 petugas sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

2.3.1 Beberapa isu permasalahan penting dalam bidang sosial, antara lain

:

- a. Belum optimalnya tingkat pemberdayaan PMKS
- b. Masih belum optimalnya penanganan PMKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Verifikasi dan Validasi Data PMKS di kabupaten pematang jaya belum Optimal, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya tim Ferval secara terpadu;
- d. Belum adanya rumah singgah untuk penampungan dan penanganan PMKS

Dari beberapa isu tersebut diatas apabila tidak diantisipasi maka dampak yang ditimbulkan antara lain masih belum meningkatnya kesejahteraan sosial melalui penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS.

2.3.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan anak dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini terlihat dari nilai IDG Kabupaten Pemalang yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional walaupun capaian persentase keterwakilan di instansi pemerintah dan posisi perempuan sebagai tenaga manajerial, administrasi dan teknis di Kabupaten Pemalang sudah cukup tinggi yaitu 62,76%;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak karena adanya keterbatasan SDM dan sarpras UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) yang terdapat di desa;
- c. Kurangnya peran perempuan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga;
- d. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsive gender

Dari beberapa isu di atas akan berdampak yang dimungkinkan timbul antara lain semakin belum meratanya hasil pembangunan yang dirasakan perempuan dan makin belum terlindunginya perempuan dan anak dari berbagai kemungkinan kekerasan sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak mungkin dibendung di masyarakat.

2.3.3 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih rendahnya partisipasi peserta KB aktif dan pengendalian penduduk;
- b. Meningkatnya angka kelahiran remaja;
- c. Masih tingginya unmet need dan DO dalam ber KB
- d. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB, ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alat kontrasepsi MOP, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang MOP;
- e. Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, prasarana dan sarana pelayanan KB. Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 222 kelurahan/ desa yang ditangani oleh 74 orang PLKB sehingga ratio PLKB 1:3, artinya 1 orang PLKB melayani 3 desa

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisa terhadap rancangan awal diperoleh informasi bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, diakomodir dalam 13 (tiga belas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan 112 (seratus dua belas) sub kegiatan. Apabila dilihat dari sisi penganggaran indikatif semua sub kegiatan sudah sesuai antara indikasi anggaran dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan indikatif pada Rencana Kerja yang ada.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Pemalang Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
	DINSOS KB, PP, PA	DINSOS KBPP				24,326,773,000		Kab Pemalang				24,326,773,000	
			Persentase PMKS yang ditangani	%	17,87				Persentase PMKS yang ditangani	%	17,87		
			IKM	Angka	84.00				IKM	Angka	84.00		
			TFR	Nilai	2,48				TFR	Nilai	2,48		
			IDG	Nilai	82,60				IDG	Nilai	82,60		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINSOS KBPP				9,126,728,800	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINSOS KBPP				9,126,728,800	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan ketepatan laporan	%	100	6,841,728,800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan ketepatan laporan	%	100	6,841,728,800	
		DINSOS KBPP	SAKIP	Nilai	60,50	5,392,844,000		DINSOS KBPP	SAKIP	Nilai	60,50	5,392,844,000	
		DINSOS KBPP	IRB	Nilai	61,00	1,448,884,800		DINSOS KBPP	IRB	Nilai	61,00	1,448,884,800	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan	%	100	300,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan	%	100	300,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			akuntabel					akuntabel					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	9	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	9	40,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah DPA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah DPA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DINSOS KBPP	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun		1	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS KBPP	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	13	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS KBPP	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	13	40,000,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	laporan	12	100,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	laporan	12	100,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%	100	5,092,844,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%	100	5,092,844,000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINSOS KBPP	jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	34	4,968,244,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINSOS KBPP	jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	34	4,968,244,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINSOS KBPP	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	62,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINSOS KBPP	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	62,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DINSOS KBPP	jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	dokumen	6	62,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DINSOS KBPP	jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	dokumen	6	62,300,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase ketersediaan/pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	433,120,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase ketersediaan/pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	433,120,700	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINSOS KBPP	Jenis instalasi listrik	Jenis	7	24,820,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINSOS KBPP	Jenis instalasi listrik	Jenis	7	24,820,000	
		DINSOS KBPP	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	buah	162			DINSOS KBPP	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	buah	162		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS KBPP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit	4	91,300,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS KBPP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit	4	91,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINSOS KBPP	jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	3	10,000,700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINSOS KBPP	jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	3	10,000,700	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINSOS KBPP	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	paket	4	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINSOS KBPP	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	paket	4	30,000,000	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINSOS KBPP	jumlah barang yang dicetak dan digandakan penggandaan surat-surat/dokumen	Paket	1	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINSOS KBPP	jumlah barang yang dicetak dan digandakan penggandaan surat-surat/dokumen	Paket	1	20,000,000	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINSOS KBPP	jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	Buku	2	7,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINSOS KBPP	jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	Buku	2	7,000,000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINSOS KBPP	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kali	250	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINSOS KBPP	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kali	250	250,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	DINSOS KBPP	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik	%	100	52,755,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	DINSOS KBPP	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik	%	100	52,755,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pemerintah Daerah		daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas				Pemerintah Daerah		daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas				
14	Pengadaan Mebel	DINSOS KBPP	jumlah mebeleur yang dibeli	Unit	12	30,000,000	Pengadaan Mebel	DINSOS KBPP	jumlah mebeleur yang dibeli	Unit	12	30,000,000	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DINSOS KBPP	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	12	22,755,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DINSOS KBPP	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	12	22,755,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINSOS KBPP	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	763,009,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINSOS KBPP	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	763,009,100	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINSOS KBPP	Jumlah surat dinas yang	Surat	2500	40,089,100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINSOS KBPP	Jumlah surat dinas yang	Surat	2500	40,089,100	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			terkirim					terkirim					
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINSOS KBPP	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	bulan	12	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINSOS KBPP	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	bulan	12	120,000,000	
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS KBPP	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia tiap bulan	bulan	12	46,720,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS KBPP	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia tiap bulan	bulan	12	46,720,000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINSOS KBPP	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang	39	556,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINSOS KBPP	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang	39	556,200,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINSOS KBPP	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan	%	100	200,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINSOS KBPP	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan	%	100	200,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			tugas					tugas					
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINSOS KBPP	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	99	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINSOS KBPP	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	99	100,000,000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINSOS KBPP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINSOS KBPP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	100,000,000	
22	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS KBPP	Persentase psks yang diberdayakan	%	28,10	307,000,000	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS KBPP	Persentase psks yang diberdayakan	%	28,10	307,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian	%	100	1,000,000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian	%	100	1,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DINSOS KBPP	Jumlah kecamatan yang memfasilitasi Izin undian	Kecamatan	14	1,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DINSOS KBPP	Jumlah kecamatan yang memfasilitasi Izin undian	Kecamatan	14	1,000,000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%	100	306,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%	100	306,000,000	
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah PSM yang meningkatkan kemampuannya	orang	10	7,025,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah PSM yang meningkatkan kemampuannya	orang	10	7,025,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang meningkat kemampuannya	orang	14	223,580,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang meningkat kemampuannya	orang	14	223,580,000	
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah terfasilitasinya keluarga yang mendapat program keluarga harapan (PKH),KUBE,W RSE,Rakor data PMKS,PBI dan KKS.	orang	20	6,725,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah terfasilitasinya keluarga yang mendapat program keluarga harapan (PKH),KUBE,WR SE,Rakor data PMKS,PBI dan KKS.	orang	20	6,725,000	
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah PKSK yang meningkat kapasitasnya	orang	40	33,118,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah PKSK yang meningkat kapasitasnya	orang	40	33,118,000	
27	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	DINSOS KBPP	Jumlah karang taruna dan lembaga konsultasi	lembaga	230	35,552,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	DINSOS KBPP	Jumlah karang taruna dan lembaga konsultasi	lembaga	230	35,552,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		kesejahteraan sosial keluarga (LK3) yang meningkat kapasitasnya				Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		kesejahteraan sosial keluarga (LK3) yang meningkat kapasitasnya				
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS KBPP	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	504,000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS KBPP	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	504,000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINSOS KBPP	Presentase pemulangan warga negara migran yang tertangani	%	100	504,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINSOS KBPP	Presentase pemulangan warga negara migran yang tertangani	%	100	504,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINSOS KBPP	Jumlah fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	kali	2	504,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINSOS KBPP	Jumlah fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	kali	2	504,000	
	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS KBPP	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	51	414,496,000	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS KBPP	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	51	414,496,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang	922	161,396,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang	922	161,396,000	
29	Penyediaan Permakanan	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat permakanan	Orang	250	15,300,000	Penyediaan Permakanan	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat permakanan	Orang	250	15,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30	Penyediaan Sandang	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Sandang	orang	150	20,144,000	Penyediaan Sandang	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Sandang	orang	150	20,144,000	
31	Penyediaan Alat Bantu	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat Alat Bantu	orang	70	19,545,500	Penyediaan Alat Bantu	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat Alat Bantu	orang	70	19,545,500	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	30	14,460,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	30	14,460,000	
33	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Fisik, mental, spiritual dan	orang	145	18,575,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Fisik, mental, spiritual dan Sosial	orang	145	18,575,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Sosial										
34	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINSOS KBPP	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Sosial	orang	100	2,676,500	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINSOS KBPP	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Sosial	orang	100	2,676,500	
35	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Orang	30	8,560,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	30	8,560,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			di Luar Panti Sosial yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak					Sosial yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak					
36	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	25	22,524,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	25	22,524,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
37	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINSOS KBPP	Jumlah fasilitas Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	70	16,511,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINSOS KBPP	Jumlah fasilitas Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	70	16,511,000	
38	Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS KBPP	Jumlah fasilitas Layanan kedaruratan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	42	20,900,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS KBPP	Jumlah fasilitas Layanan kedaruratan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	42	20,900,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Sosial										
39	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	10	1,200,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	10	1,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
40	Pemberian Layanan Rujukan	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	25	1,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	25	1,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	%	48	253,100,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	%	48	253,100,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINSOS KBPP	Jumlah Fasilitas Layanan data dan Pengaduan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	20	1,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINSOS KBPP	Jumlah Fasilitas Layanan data dan Pengaduan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	20	1,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS KBPP	Jumlah Fasilitas Layanan kedaruratan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	20	1,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS KBPP	Jumlah Fasilitas Layanan kedaruratan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	20	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Penyediaan Permakanan	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Permakanan	Orang	12	1,000,000	Penyediaan Permakanan	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Permakanan	Orang	12	1,000,000	
40	Penyediaan Sandang	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Sandang	Orang	48	17,400,000	Penyediaan Sandang	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Sandang	Orang	48	17,400,000	
	Penyediaan Alat Bantu	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Orang	5	1,000,000	Penyediaan Alat Bantu	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN	Orang	5	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Alat Bantu					Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Alat Bantu					
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	DINSOS KBPP	Jumlah Persediaan Perbekalan Kesehatan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	12	1,000,000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	DINSOS KBPP	Jumlah Persediaan Perbekalan Kesehatan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	12	1,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang	Orang	12	1,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	DINSOS KBPP	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang	Orang	12	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	DINSOS KBPP	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Orang	12	1,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	DINSOS KBPP	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Orang	12	1,000,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	DINSOS KBPP	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak untuk	Orang	25	1,000,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	DINSOS KBPP	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak untuk Penyandang Masalah	Orang	25	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.					Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.					
	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINSOS KBPP	Jumlah Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINSOS KBPP	Jumlah Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	Pemberian layanan penelusuran keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41	Pemberian Layanan Rujukan	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	DINSOS KBPP	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Orang	10	1,000,000	
41	1.06.04.2.02.14	DINSOS KBPP	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	MOU	1	223,700,000	1.06.04.2.02.14	DINSOS KBPP	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	MOU	1	223,700,000	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS KBPP	Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan	%	28.48	1,465,906,100	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS KBPP	Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan	%	28.48	1,465,906,100	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			satu dan dua					satu dan dua					
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Orang	97	25,198,500	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Orang	97	25,198,500	
42	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah penjangkauan anak terlantar setiap tahun	kali	10	2,701,400	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah penjangkauan anak terlantar setiap tahun	kali	10	2,701,400	
43	Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rujukan	orang	10	3,269,400	Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rujukan	orang	10	3,269,400	
44	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah monev anak anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	kali	77	19,227,700	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINSOS KBPP	Jumlah monev anak anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	kali	77	19,227,700	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Terupdatenya Data Fakir miskin	Dokumen	1	1,440,707,600	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Terupdatenya Data Fakir miskin	Dokumen	1	1,440,707,600	
45	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan verwal	Desa/Kelurahan	222	287,268,600	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan verwal	Desa/Kelurahan	222	287,268,600	
46	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah dokumen kemiskinan terupdate	Dokumen	1	143,290,600	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah dokumen kemiskinan terupdate	Dokumen	1	143,290,600	
47	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS KBPP	jumlah rumah tangga yg mndapatkan basos , pkh, bpnt	ruta	210,589	1,000,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS KBPP	jumlah rumah tangga yg mndapatkan basos , pkh, bpnt	ruta	210,589	1,000,000,000	
48	Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	DINSOS KBPP	Jumlah anggota kube yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi	kelompok	30	10,148,400	Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	DINSOS KBPP	Jumlah anggota kube yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi	kelompok	30	10,148,400	
	Program Penanganan Bencana	DINSOS KBPP	Persentase korban bencana alam dan sosial yang	%	100	74,093,900	Program Penanganan Bencana	DINSOS KBPP	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	%	100	74,093,900	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota					dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota					
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	25,741,700	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	25,741,700	
	Penyediaan Makanan	DINSOS KBPP	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial	orang	50	7,500,000	Penyediaan Makanan	DINSOS KBPP	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial	orang	50	7,500,000	
	Penyediaan Sandang	DINSOS KBPP	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang	orang	26	10,000,000	Penyediaan Sandang	DINSOS KBPP	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan	orang	26	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			mendapat bantuan sandang					sandang					
51	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	DINSOS KBPP	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang tersedia	titik	3	3,113,400	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	DINSOS KBPP	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang tersedia	titik	3	3,113,400	
52	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	DINSOS KBPP	jumlah kelompok rentan yang di tangani	orang	50	2,829,400	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	DINSOS KBPP	jumlah kelompok rentan yang di tangani	orang	50	2,829,400	
53	Pelayanan Dukungan Psikososial	DINSOS KBPP	jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	titik	10	2,298,900	Pelayanan Dukungan Psikososial	DINSOS KBPP	jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	titik	10	2,298,900	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiapsiagaan bencana	desa	8	48,352,200	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiapsiagaan bencana	desa	8	48,352,200	
54	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	DINSOS KBPP	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga	kali	4	10,724,400	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	DINSOS KBPP	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga	kali	4	10,724,400	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			siaga bencana					bencana					
55	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	DINSOS KBPP	JumlahKoordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kali	4	37,627,800	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	DINSOS KBPP	JumlahKoordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kali	4	37,627,800	
56	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOS KBPP	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	23,000,000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOS KBPP	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	23,000,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	23,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	23,000,000	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah taman makam pahlawan yang direhab	jumlah	1	1,000,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah taman makam pahlawan yang direhab	jumlah	1	1,000,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pemeliharaan	tempat	1	1,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pemeliharaan	tempat	1	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
57	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pengamanan	tempat	1	21,000,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pengamanan	tempat	1	21,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINSOS KBPP				500,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINSOS KBPP				500,000,000	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOS KBPP				500,000,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOS KBPP				500,000,000	
	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINSOS KBPP	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5.4	165,000,000	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINSOS KBPP	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5.4	165,000,000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan	DINSOS KBPP	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	80	115,000,000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan	DINSOS KBPP	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	80	115,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota						
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DINSOS KBPP	jumlah regulasi daerah (perda) PUG tersusun	Dokumen	1	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DINSOS KBPP	jumlah regulasi daerah (perda) PUG tersusun	Dokumen	1	50,000,000	
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah anggota POKJA PUG yang meningkatkan perangnya dalam PUG	tim	1	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah anggota POKJA PUG yang meningkatkan perangnya dalam PUG	tim	1	35,000,000	
		DINSOS KBPP	Jumlah dokumen evaluasi APE yang tersusun	Dokumen	1			DINSOS KBPP	Jumlah dokumen evaluasi APE yang tersusun	Dokumen	1		
60	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DINSOS KBPP	Jumlah OPD Driver yang meningkatkan kapasitas dalam penyusunan dan pengawasan PPRG	Tim	1	30,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DINSOS KBPP	Jumlah OPD Driver yang meningkatkan kapasitas dalam penyusunan dan pengawasan PPRG	Tim	1	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		DINSOS KBPP	jumlah perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyusunan PPRG	desa	30		DINSOS KBPP	jumlah perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyusunan PPRG	desa	30			
		DINSOS KBPP	jumlah perencanaan OPD yang mampu menyusun PPRG	OPD	50		DINSOS KBPP	jumlah perencanaan OPD yang mampu menyusun PPRG	OPD	50			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	0.06	25,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	0.06	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DINSOS KBPP	Jumlah perempuan rentan ekonomi yang didampingi bidang ekonomi	Orang	25	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DINSOS KBPP	Jumlah perempuan rentan ekonomi yang didampingi bidang ekonomi	Orang	25	25,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52	25,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52	25,000,000	
62	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah anggota Forum puspa yang meningkat kapasitasnya dan terfasilitasi	orang	50	25,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah anggota Forum puspa yang meningkat kapasitasnya dan terfasilitasi	orang	50	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Perlindungan Perempuan	DINSOS KBPP	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)	%	100	135,000,000	Program Perlindungan Perempuan	DINSOS KBPP	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)	%	100	135,000,000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)	%	7.6	0	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)	%	7.6	0	
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah anggota gugus tugas trafficking yang terfasilitasi	orang	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah anggota gugus tugas trafficking yang terfasilitasi	orang	0	0	
64	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	DINSOS KBPP	Jumlah masyarakat yang meningkatkan pemahaman terkait perlindungan	Orang	0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	DINSOS KBPP	Jumlah masyarakat yang meningkatkan pemahaman terkait perlindungan	Orang	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kabupaten/Kota		Nakerwan				Kabupaten/Kota		Nakerwan				
		DINSOS KBPP	Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	kelompok	0	0		DINSOS KBPP	Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	kelompok	0	0	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%	100	100,000,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%	100	100,000,000	
65	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani medis kuratif	orang	20	25,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani medis kuratif	orang	20	25,000,000	
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	DINSOS KBPP	Jumlah peserta rakor KtPA meningkat kapasitas dan perannya dalam	tim kegiatan	60	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DINSOS KBPP	Jumlah peserta rakor KtPA meningkat kapasitas dan perannya dalam perlindungan korban	tim kegiatan	60	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		perlindungan korban kekerasan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan terfasilitasi				Kewenangan Kabupaten/Kota		kekerasan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan terfasilitasi					
		DINSOS KBPP	Jumlah korban KtPA tertangani penjangkauan dan pendampingan	orang	50			DINSOS KBPP	Jumlah korban KtPA tertangani penjangkauan dan pendampingan	orang	50			
		DINSOS KBPP	Jumlah korban KtPA terfasilitasi mediko legal	orang	20			DINSOS KBPP	Jumlah korban KtPA terfasilitasi mediko legal	Orang	20			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	84,30	35,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	84,30	35,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			n										
67	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah Kader PP-PA yang meningkat kapasitasnya	Orang	30	30,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah Kader PP-PA yang meningkat kapasitasnya	Orang	30	30,000,000	
68	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah bantuan spesifik perempuan korban kekerasan tersedia	orang	5	5,000,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah bantuan spesifik perempuan korban kekerasan tersedia	orang	5	5,000,000	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DINSOS KBPP	Persentase pernikahan usia anak	%	4,75	55,000,000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DINSOS KBPP	Persentase pernikahan usia anak	%	4,75	55,000,000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam	%	100	30,000,000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	DINSOS KBPP	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam	%	100	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kabupaten/Kota		mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak				Kabupaten/Kota		mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak				
69	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak	orang	30	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak	orang	30	10,000,000	
70	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah media KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga tersedia	buah	14	10,000,000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah media KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga tersedia	buah	14	10,000,000	
		DINSOS KBPP	Jumlah kader yang memahami kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga	orang	30			DINSOS KBPP	Jumlah kader yang memahami kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga	orang	30		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah orang (kelompok) yang meningkatkan pemahamannya terkait pola asuh anak	kelompok	5	10,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah orang (kelompok) yang meningkatkan pemahamannya terkait pola asuh anak	kelompok	5	10,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	100	20,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	100	20,000,000	
72	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah lembaga penyedia layanan yang berkembang untuk peningkatan kualitas keluarga	kelompok	5	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah lembaga penyedia layanan yang berkembang untuk peningkatan kualitas keluarga	kelompok	5	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
73	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan yang terlatih Konvensi Hak Anak	orang	30	7,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan yang terlatih Konvensi Hak Anak	orang	30	7,000,000	
74	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah media KIE yang tersedia	pcs	1000	3,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah media KIE yang tersedia	pcs	1000	3,000,000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	5,000,000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	5,000,000	
75	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah	DINSOS KBPP	Jumlah peserta sosialisasi penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang	orang	5	5,000,000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	DINSOS KBPP	Jumlah peserta sosialisasi penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang melaksanakan	orang	5	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		melaksanakan layanan komprehensif				Daerah Kabupaten/Kota		layanan komprehensif				
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DINSOS KBPP	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%	81,48	20,000,000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DINSOS KBPP	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%	81,48	20,000,000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	37,50	20,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	37,50	20,000,000	
76	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah dokumen data gender dan anak tersusun	dokumen	1	10,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah dokumen data gender dan anak tersusun	dokumen	1	10,000,000	
77	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	DINSOS KBPP	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami data gender	orang	30	10,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami data gender dan anak	orang	30	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kabupaten/Kota		dan anak										
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DINSOS KBPP	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	27,03	84,039,000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DINSOS KBPP	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	27,03	84,039,000	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	%	63,30	32,964,000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	%	63,30	32,964,000	
78	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Anak tersusun	dokumen	1	4,898,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Anak tersusun	dokumen	1	4,898,000	
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak	DINSOS KBPP	jumlah anggota gugus tugas yang meningkat	Orang	30	28,066,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak	DINSOS KBPP	jumlah anggota gugus tugas yang meningkat	Orang	30	28,066,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		kualitasnya				Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		kualitasnya				
		DINSOS KBPP	jumlah dokumen evaluasi KLA yang tersusun	Dokumen	1			DINSOS KBPP	jumlah dokumen evaluasi KLA yang tersusun	Dokumen	1		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52,40	51,075,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52,40	51,075,000	
80	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah anggota forum anak kabupaten yang meningkat kapasitasnya	orang	20	15,012,500	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah anggota forum anak kabupaten yang meningkat kapasitasnya	orang	20	15,012,500	
		DINSOS KBPP	jumlah desa/kelurahan yang tersosialisasi pembentukan forum anak	desa	15			DINSOS KBPP	jumlah desa/kelurahan yang tersosialisasi pembentukan forum anak	desa	15		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
81	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah Dekelara yang terevaluasi	lokasi	6	12,394,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah Dekelara yang terevaluasi	lokasi	6	12,394,500	
82	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah media KIE berupa Leaflet PHA tersedia	Lembar	1000	8,950,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah media KIE berupa Leaflet PHA tersedia	Lembar	1000	8,950,000	
		DINSOS KBPP	jumlah media KIE berupa Stickert PHA tersedia	Lembar	1300			DINSOS KBPP	jumlah media KIE berupa Stickert PHA tersedia	Lembar	1300		
		DINSOS KBPP	jumlah media KIE berupa Roll/Banner PHA tersedia	buah	5			DINSOS KBPP	jumlah media KIE berupa Roll/Banner PHA tersedia	buah	5		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
83	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah pengelola dan guru PAUD yang terlatih KHA jumlah Peserta yang tersosialisasi Kelana dan Dekela	Orang	30	14,718,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah pengelola dan guru PAUD yang terlatih KHA jumlah Peserta yang tersosialisasi Kelana dan Dekela	Orang	30	14,718,000	
		DINSOS KBPP	jumlah Peserta yang tersosialisasi Dekela	Orang	20			DINSOS KBPP	jumlah Peserta yang tersosialisasi Dekela	Orang	20		
	Program Perlindungan Khusus Anak	DINSOS KBPP	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	%	100	40,961,000	Program Perlindungan Khusus Anak	DINSOS KBPP	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	%	100	40,961,000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%	30	14,764,000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%	30	14,764,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
84	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah peserta tersosialisasi kebijakan perlindungan anak	Orang	40	10,175,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah peserta tersosialisasi kebijakan perlindungan anak	Orang	40	10,175,000	
85	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang terkoordinasi	lembaga	10	4,589,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang terkoordinasi	lembaga	10	4,589,000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%	43,10	26,197,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%	43,10	26,197,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
86	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah ABH yang terfasilitasi layanan	orang	15	11,906,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah ABH yang terfasilitasi layanan	orang	15	11,906,000	
		DINSOS KBPP	Jumlah Dokumen SIMEP KPAI yang tersusun	dokumen	1			DINSOS KBPP	Jumlah Dokumen SIMEP KPAI yang tersusun	dokumen	1		
87	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah tenaga pelayanan dan pendampingan ABH yang terlatih	orang	25	6,399,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	jumlah tenaga pelayanan dan pendampingan ABH yang terlatih	orang	25	6,399,000	
88	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	DINSOS KBPP	jumlah media KPA yang dikembangkan	jenis	2	3,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	DINSOS KBPP	jumlah media KPA yang dikembangkan	jenis	2	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota						
89	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah satgas perlindungan anak sekolah terbentuk	sekolah	5	4,892,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Jumlah satgas perlindungan anak sekolah terbentuk	sekolah	5	4,892,000	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINSOS KBPP				14,700,044,200	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINSOS KBPP				14,700,044,200	
	Program Pengendalian Penduduk	DINSOS KBPP	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%	34	609,503,600	Program Pengendalian Penduduk	DINSOS KBPP	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%	34	609,503,600	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan	%	100	609,503,600	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan	%	100	609,503,600	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			KKBP					KKBP					
	Perumusan Parameter Kependudukan	DINSOS KBPP	Jumlah Keluarga di Desa/Kelurahan Terdata dalam Program Pendataan Keluarga	Desa/ke lu	222	609,503,600	Perumusan Parameter Kependudukan	DINSOS KBPP	Jumlah Keluarga di Desa/Kelurahan Terdata dalam Program Pendataan Keluarga	Desa /kel u	222	609,503,600	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	DINSOS KBPP	Jumlah Peringatan Harganas Terfasilitasi	kegiatan	0	0	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	DINSOS KBPP	Jumlah Peringatan Harganas Terfasilitasi	kegiatan	0	0	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DINSOS KBPP	Angka Prevalensi Modern CPRm	%	23,00	13,863,297,900	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DINSOS KBPP	Angka Prevalensi Modern CPRm	%	23,00	13,863,297,900	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINSOS KBPP	Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	%	100	5,200,000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINSOS KBPP	Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	%	100	5,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINSOS KBPP	Jumlah Desa/Kelurahan Teradvokasi Program Bangsa Kencana oleh PLKB Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Pelayanan KIE Keliling oleh Tim Mupen Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Pelayanan KIE oleh PPLKB	Kelompok Kecamatan Desa/ke lu	222	5,200,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINSOS KBPP	Jumlah Desa/Kelurahan Teradvokasi Program Bangsa Kencana oleh PLKB Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Pelayanan KIE Keliling oleh Tim Mupen Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Pelayanan KIE oleh PPLKB	Kelompok Kecamatan Desa/ke lu	222	5,200,000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DINSOS KBPP	Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB	%	100	559,400,200	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DINSOS KBPP	Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB	%	100	559,400,200	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DINSOS KBPP	Jumlah PLKB yang Terbina dalam Pengembangan Program KKBPK	Orang Orang	70	559,400,200	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DINSOS KBPP	Jumlah PLKB yang Terbina dalam Pengembangan Program KKBPK	Orang Orang	70	559,400,200	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%	70.26	13,291,925,700	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS KBPP	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%	70.26	13,291,925,700	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DINSOS KBPP	Jumlah faskes yang menerima alkon MKJP (Faskes)	orang	8	15,445,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DINSOS KBPP	Jumlah faskes yang menerima alkon MKJP (Faskes)	orang	8	15,445,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DINSOS KBPP	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani KB MKJP	orang	300	28,365,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DINSOS KBPP	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani KB MKJP	orang	300	28,365,000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DINSOS KBPP	Jumlah Komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP yang terlayani	orang	14	15,780,000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DINSOS KBPP	Jumlah Komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP yang terlayani	orang	14	15,780,000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DINSOS KBPP	Jumlah PUS yang mendapat pembinaan KBKR	PUS	14	48,800,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DINSOS KBPP	Jumlah PUS yang mendapat pembinaan KBKR	PUS	14	48,800,000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DINSOS KBPP	Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Program Bangsa Bangsa	kecamatan	14	13,091,925,700	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DINSOS KBPP	Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Program Bangsa Kencana	kecamatan	14	13,091,925,700	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kencana										
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	DINSOS KBPP	Jumlah kelompok KB pria yang mengikuti sosialisasi	kelompok	222	91,610,000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	DINSOS KBPP	Jumlah kelompok KB pria yang mengikuti sosialisasi	kelompok	222	91,610,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DINSOS KBPP	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	%	100	6,772,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DINSOS KBPP	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	%	100	6,772,000	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DINSOS KBPP	Jumlah Anggota Kelompok Peduli KB FABSEDU Jumlah Anggota Kelompok Peduli KB KKI	Orang	75	5,000,000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DINSOS KBPP	Jumlah Anggota Kelompok Peduli KB FABSEDU Jumlah Anggota Kelompok Peduli KB KKI	Orang	75	5,000,000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di	DINSOS KBPP	Jumlah Kelompok Kerja di Kampung KB	orang	36	1,772,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di	DINSOS KBPP	Jumlah Kelompok Kerja di Kampung KB Terbina	orang	36	1,772,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kampung KB		Terbina Jumlah PLKB Terbina Jumlah PPKBD Terbina				Kampung KB		Jumlah PLKB Terbina Jumlah PPKBD Terbina				
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DINSOS KBPP	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	%	85.84	227,242,700	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DINSOS KBPP	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	%	85.84	227,242,700	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS KBPP	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	%	100	179,372,700	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS KBPP	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	%	100	179,372,700	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	DINSOS KBPP	Jumlah PIK-KRR berkembang dari tumbuh menjadi tegak Jumlah Remaja Teradvokasi Program KRR	kelompok	66	2,002,700	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	DINSOS KBPP	Jumlah PIK-KRR berkembang dari tumbuh menjadi tegak Jumlah Remaja Teradvokasi Program KRR	kelompok	66	2,002,700	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DINSOS KBPP	Jumlah Sarana dan Prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi	unit	2952	21,750,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DINSOS KBPP	Jumlah Sarana dan Prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi	unit	2952	21,750,000	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	DINSOS KBPP	Jumlah Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	orang	288	27,360,000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	DINSOS KBPP	Jumlah Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	orang	288	27,360,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Keluarga/UPPKS)						Keluarga/UPPKS)						
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DINSOS KBPP	Jumlah Kader Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	orang	162	48,588,000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DINSOS KBPP	Jumlah Kader Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	orang	162	48,588,000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DINSOS KBPP	Jumlah Biaya Operasional Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS yang terfasilitasi	desa	222	54,432,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DINSOS KBPP	Jumlah Biaya Operasional Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS yang terfasilitasi	desa	222	54,432,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DINSOS KBPP	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program Genre	orang	144	25,240,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DINSOS KBPP	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program Genre	orang	144	25,240,000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS KBPP	Persetase Kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	%	100	47,870,000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS KBPP	Persetase Kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	%	100	47,870,000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Melalui	DINSOS KBPP	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi	kelompok	66	47,870,000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Melalui	DINSOS KBPP	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui	kelompok	66	47,870,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Momentum		KKBPK melalui momentum				Momentum		momentum				

2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5.

Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran /Volume (5)	Catatan (6)
Kecamatan Moga					
--	--	--	--	--	--
Kecamatan Belik					
--	--	--	--	--	--
Kecamatan Watukumpul					
--	--	--	--	--	--
Kecamatan Pulosari					
--	--	--	--	--	--
Kecamatan Randudongkal					
--	--	--	--	--	--
Kecamatan Warungpring					
--	--	--	--	--	--
Kecamatan Ampelgading					
--	--	--	--		
Kecamatan Bodeh					
--	--	--	--		
Kecamatan Comal					
--	--	--	--		
Kecamatan Pematang					
--	--	--	--		
Kecamatan Petarukan					
--	--	--	--		
Kecamatan Taman					
--	--	--	--		
Kecamatan Bantarbolang					
--	--	--	--		
Kecamatan Petarukan Uluiami					
--	--	--	--		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peremendagri 17 tahun 2021 berikut ini prioritas nasional untuk sosial pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada arah kebijakan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dikatakan bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - a. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - b. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - c. Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - d. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Sistem jaminan sosial nasional;
 - b. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - c. Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - b. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - c. Kualitas Pemuda.
4. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - b. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - c. Reforma Agraria; dan
 - d. Perhutanan Sosial.

Tabel Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang

Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Pemalang
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	<p>Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan</p> <p>Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana</p>	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan pelayanan dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kualitas perempuan, anak dan pemuda dalam kesetaraan dan keadilan gender.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 70,93 persen pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 12,14 persen pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15- 19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan d. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
- f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif;
- h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan

Layak Anak (RPLA);

Tujuan Strategis Kementerian Sosial adalah

- a. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
- b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
- c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis renstra di Kementerian Sosial adalah a.

Meningkatnya kemandirian sosial

- a. . ekonomi penduduk miskin dan rentan
- b. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- c. Meningkatnya kualitas data terpadu e.
kesejahteraan sosial

Terkait dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Agenda Lima yakni Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah isu strategis yang diangkat adalah Rehabilitasi sosial PMKS dalam panti yang belum memenuhi SPM, Penangan PMKS Non produktif yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial guna mempercepat menurunnya garis kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program cash transfer guna mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta penguatan data kemiskinan melalui pengelolaan dan pemuthakiran data kemiskinan dan PMKS lainnya agar problem kelembagaan berupa inclusion error dan exclusion error dapat teratasi.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Ketiga Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026 dengan sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Untuk kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional sesuai dengan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain; meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk trafficking, meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Kedua dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan tujuan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dan sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik.

Dalam Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah maka kebijakan yang ada antara lain;

- a. menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dengan sasaran ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan dengan sasaran meningkatnya capaian komposit Indeks Pembangunan Gender.

- c. Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan dengan sasaran meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak.
- d. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya capaian indikator IPG dan IDG.
- e. Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan dengan sasaran meningkatnya lingkungan ramah anak, meningkatnya Persentase korban yang mendapatkan layanan dari petugas terlatih, dan berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan serta berkurangnya resiko kerentanan pada anak (penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, ABH).
- f. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta Perguruan Tinggi dalam PUG dan PUHA dengan sasaran meningkatnya Kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media serta Perguruan Tinggi yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA.
- g. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) dan turunnya angka dropout dan unmetneed.
- h. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan sasaran meningkatnya usia perkawinan.
- i. Meningkatkan kualitas keluarga dengan sasaran meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Ketiga dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 dengan tujuan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sementara itu Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan dibidang sosial tahun 2020 diarahkan pada Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, dengan prioritas pada:

- a. Penataan asistensi sosial: KIS, KIP dan KKS; dan
- b. Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH:

Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Ketiga, RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong dengan tujuan ketiga Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam penurunan pengangguran.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial KB PP selaras dengan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan :**
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS
 2. Menurunkan angka kelahiran
 3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
 4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Sasaran :**
1. Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS
 2. Menurunnya angka kelahiran pada kelompok usia tertentu
 3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
 4. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak
 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

Maka berdasarkan hasil analisis tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 relevan dengan isu-isu strategis yang ada dan yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS		Persentase PMKS yang ditangani	Persen	17,87
		Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS	Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	Persen	57,48

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	57
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	100
2	Menurunkan angka kelahiran		TFR	Angka	2,48
		Menurunnya angka kelahiran pada kelompok usia tertentu	ASFR (15-49 Tahun)	Angka	35,00
			Angka Prevalensi modern Contraceptive Prevalence (mCP)	Persen	23,30
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	10,08
3	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai	82,60
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG/ Penghargaan APE	Nilai	Utama
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan hak anak	Indeks KLA	Nilai	Nindya

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		IKM	Nilai	84,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	60,50
			Nilai IRB	Nilai	61,00

Maka berdasarkan hasil analisis tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 relevan dengan isu-isu strategis yang ada dan yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pematang Jaya.

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Pematang Jaya, pengurangan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Adapun rincian program, kegiatan dan anggaran dalam Renja OPD Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 2023 Kabupaten Pemalang**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang		Kab. Pemalang		21,360,188,000.00	DAU			23,798,922,800.00	
	1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	1.06 Sosial									
		Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,00	6,586,605,800.00			84,00	7,498,021,380.00
		Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%		100	6,586,605,800			100	7,498,021,380
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai		60,50	5,137,721,000.00			60,50	5,651,493,100.00
		Nilai IRB	Nilai		61,00	1,448,884,800.00			61,00	1,846,528,280.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%		100	300,000,000			100	330,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6	100,000,000			6	110,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2	100,000,000			2	110,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3	100,000,000			3	110,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%		100	4,837,721,000			100	5,321,493,100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		30	4,713,121,000			30	5,184,433,100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	62,300,000			1	68,530,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		6	62,300,000			6	68,530,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%		100	0			100	200,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0				0	100,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		0				0	100,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan/pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	496,477,900			100	546,125,690
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	20,720,000			1	22,792,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	130,000,000			1	143,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	34,344,900			1	37,779,390
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	34,699,000			1	38,168,900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	17,000,000			1	18,700,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		1	9,490,000			1	10,439,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		250	250,224,000			250	275,246,400
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		0	0			0	52,755,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0			3	30,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0			1	22,755,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	738,462,900			100	812,309,190
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	40,092,400			12	44,101,640
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan		12	100,007,500			12	110,008,250
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	37,015,000			1	40,716,500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	561,348,000			1	617,482,800

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	213,944,000			100	235,338,400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		99	104,180,000			99	114,598,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		2	109,764,000			2	120,740,400
		Persentase PMKS yang ditangani	%		17,87	1,585,000,000			17,87	1,752,500,000
		Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	%		57,48	295,096,400			57,48	324,606,040

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	%		28,10	295,096,400			28,10	324,606,040
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian	%		100	3,536,000			100	3,889,600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		1	3,536,000			1	3,889,600
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%			291,560,400				320,716,440
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	8,381,400			10	9,219,540
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		14	223,107,800			14	245,418,580

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		40	15,580,400			40	17,138,440
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		20	41,078,400			20	45,186,240
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat		10	3,412,400			10	3,753,640
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%		100	1,829,000			100	2,011,900

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Presentase pemulangan warga negara migran yang tertangani	%		100	1,829,000			100	2,011,900
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		5	1,829,000			5	2,011,900
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi	%		51	663,171,000			51	738,488,100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang		239	447,776,700			239	492,554,370

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		130	85,875,700			130	94,463,270
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		85	16,789,000			85	18,467,900
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		86	120,065,500			86	132,072,050
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		30	14,460,000			30	15,906,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		110	18,575,000			110	20,432,500
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		6	2,676,500			6	2,944,150

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		35	8,560,000			35	9,416,000
	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		23	22,524,000			23	24,776,400
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		70	16,511,000			70	18,162,100
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		95	120,900,000			95	132,990,000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	1,200,000			10	1,320,000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		20	19,640,000			20	21,604,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Orang		12	215,394,300			12	245,933,730

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			25	1,000,000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			5	1,000,000
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		20	1,000,000			20	1,100,000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		110	21,500,000			110	23,650,000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			1	1,000,000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		12	6,756,800			12	7,432,480
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			10	1,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang		0	0			0	1,000,000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV /AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			10	1,000,000
	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			10	1,000,000
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			10	1,000,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			10	1,000,000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		4	3,590,000			4	3,949,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen		3	182,547,500			3	200,802,250
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2	%		28.48	515,906,100			28.48	567,496,710
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Orang		10	25,198,500			10	27,718,350
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	2,701,400			10	2,971,540
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	3,269,400			10	3,596,340
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		77	19,227,700			77	21,150,470
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Terupdatenya Data Fakir miskin	dokumen		1	490,707,600			1	539,778,360

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang		1,010,996	287,268,600			1,010,996	315,995,460
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga		210,589	143,290,600			210,589	157,619,660
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		33	50,000,000			33	55,000,000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		5	10,148,400			5	11,163,240
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%		100	74,093,900			100	81,503,290
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%		100	25,741,700			100	28,315,870
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	7,500,000			50	8,250,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		25	10,000,000			25	11,000,000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit		3	3,113,400			3	3,424,740
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	2,829,400			50	3,112,340
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	2,298,900			10	2,528,790
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiap siagakan bencana	desa		4	48,352,200			4	53,187,420
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung		1	10,724,400			1	11,796,840

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		37	37,627,800			37	41,390,580
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.	%		100	34,903,600			100	38,393,960
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%		100	34,903,600			100	38,393,960
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen		1	7,688,300			1	8,457,130
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam		1	6,215,300			1	6,836,830
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan		1	21,000,000			1	23,100,000
	2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Nilai		82,60	500,000,000			82,60	590,961,000
		Indeks PUG	Nilai		0,81 Utama	500,000,000			0,81 Utama	590,961,000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%		5.4	165,000,000			5.4	181,500,000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutama an gender	%		85	115,000,000			85	126,500,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50,000,000			1	55,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Dokumen		2	35,000,000			2	38,500,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		40	30,000,000			40	33,000,000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%		0,06	25,000,000			0,06	27,500,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi		20	25,000,000			20	27,500,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%		52	25,000,000			52	27,500,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		50	25,000,000			50	27,500,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%		100	135,000,000			100	148,500,000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%		100	100,000,000			100	110,000,000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		100	25,000,000			100	27,500,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		50	75,000,000			50	82,500,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%		84,30	35,000,000			84,30	38,500,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	30,000,000			1	33,000,000
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		50	5,000,000			50	5,500,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pernikahan usia anak	%		4,75	55,000,000			4,75	60,500,000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	%		100	30,000,000			100	33,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		30	10,000,000			30	11,000,000
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		14	10,000,000			14	11,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	10,000,000			1	11,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%		100	20,000,000			100	22,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga		22	10,000,000			22	11,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		33	7,000,000			33	7,700,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	3,000,000			1	3,300,000
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	orang		100	5,000,000			100	5,500,000
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan		15	5,000,000			15	5,500,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%		81.48	20,000,000			81.48	22,000,000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%		37,50	20,000,000			37,50	22,000,000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		1	10,000,000			1	11,000,000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10,000,000			1	11,000,000
		Indeks KLA	Nilai		740 Nindya	125,000,000			740 Nindya	137,500,000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%		27.03	125,000,000			27.03	137,500,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	%		63,30	85,000,000			63,30	93,500,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha	Organisasi		25	5,000,000			25	5,500,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3	80,000,000			3	88,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%		52.43	40,000,000			52.43	44,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		60	10,000,000			60	11,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10,000,000			1	11,000,000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3	10,000,000			3	11,000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10,000,000			1	11,000,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	%		100	0			100	40,961,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%		0	0			0	14,764,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanngan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		0	0			40	10,175,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0			1	4,589,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%		0	0			0	26,197,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	0			20	11,906,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		0	0			10	6,399,000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0			1	3,000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0			1	4,892,000
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
		TFR	Angka		2,48	12,688,582,200			2,48	13,957,440,420
		ASFR (15-49 tahun)	Angka		35,00	609,503,600			35,00	670,453,960
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%		35,00	609,503,600			35,00	670,453,960
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pen gawasan serta pelaporan KKBP	%		100	609,503,600			100	670,453,960
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan		1	609,503,600			1	670,453,960
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Modern CPRm	%		23,00	11,701,835,900			23,00	12,872,019,490
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	%			5,200,000				5,720,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen		1	5,200,000			1	5,720,000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB	%		100	853,200,000			100	938,520,000
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan		1	853,200,000			1	938,520,000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%		70,26	10,836,663,900			70,26	11,920,330,290

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		6	15,445,000			6	16,989,500
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		400	28,365,000			400	31,201,500
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan		1	15,780,000			1	17,358,000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		600	48,800,000			600	53,680,000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan		14	10,636,663,900			14	11,700,330,290

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Apsektor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang		80	91,610,000			80	100,771,000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	%		100	6,772,000			100	7,449,200
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi		2	5,000,000			2	5,500,000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Kb yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung		237	1,772,000			237	1,949,200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	%		85,84	377,242,700			85,84	414,966,970

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	%		100	329,372,700			100	362,309,970
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok		51	2,002,700			51	2,202,970
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit		9,813	21,750,000			9,813	23,925,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		6	27,360,000			6	30,096,000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		138	198,588,000			138	218,446,800
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		222	54,432,000			222	59,875,200

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan		1	25,240,000			1	27,764,000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persetase Kecamatan ng di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	%		100	47,870,000			100	52,657,000
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan		14	47,870,000			14	52,657,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2023. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal
4. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

12. Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

13. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

14. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

15. Program Pembinaan Keluarga Berencana

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya bisa dilihat sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang						21,360,188,000.00		23,798,922,800.00	
	1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	1.06 Sosial									
	Meningkatnya pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,00	6,586,605,800.00	84,00	7,498,021,380.00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan		Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%	100	6,586,605,800	100	7,498,021,380	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	60,50	5,137,721,000.00	60,50	5,651,493,100.00	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
				Nilai IRE	Nilai	61,00	1,448,884,800.00	61,00	1,846,528,280.00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%	100	300,000,000	100	330,000,000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	100,000,000	6	110,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	100,000,000	2	110,000,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	100,000,000	3	110,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%	100	4,837,721,000	100	5,321,493,100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	4,713,121,000	30	5,184,433,100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	62,300,000	1	68,530,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	62,300,000	6	68,530,000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	100	0	100	200,000,000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0	100,000,000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0		0	100,000,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan/pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	496,477,900	100	546,125,690	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20,720,000	1	22,792,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	130,000,000	1	143,000,000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34,344,900	1	37,779,390	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34,699,000	1	38,168,900	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17,000,000	1	18,700,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	9,490,000	1	10,439,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	250,224,000	250	275,246,400	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	0	0	0	52,755,000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	3	30,000,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	22,755,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	738,462,900	100	812,309,190	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	40,092,400	12	44,101,640	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	100,007,500	12	110,008,250	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	37,015,000	1	40,716,500	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	561,348,000	1	617,482,800	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	213,944,000	100	235,338,400	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	104,180,000	99	114,598,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	109,764,000	2	120,740,400	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS			Persentase PMKS yang ditangani	%	17,87	1,585,000,000	17,87	1,752,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
		Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS		Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	%	57,48	295,096,400	57,48	324,606,040	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	28,10	295,096,400	28,10	324,606,040	
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian	%	100	3,536,000	100	3,889,600	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	3,536,000	1	3,889,600	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%		291,560,400		320,716,440	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	8,381,400	10	9,219,540	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	223,107,800	14	245,418,580	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	40	15,580,400	40	17,138,440	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	41,078,400	20	45,186,240	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	10	3,412,400	10	3,753,640	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	1,829,000	100	2,011,900	
			Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Presentase pemulangan warga negara migran yang tertangani	%	100	1,829,000	100	2,011,900	
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	5	1,829,000	5	2,011,900	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi	%	51	663,171,000	51	738,488,100	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang	239	447,776,700	239	492,554,370	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	85,875,700	130	94,463,270	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	16,789,000	85	18,467,900	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	86	120,065,500	86	132,072,050	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	14,460,000	30	15,906,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	110	18,575,000	110	20,432,500	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	2,676,500	6	2,944,150	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	8,560,000	35	9,416,000	
			Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	23	22,524,000	23	24,776,400	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	16,511,000	70	18,162,100	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	95	120,900,000	95	132,990,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	1,200,000	10	1,320,000	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	19,640,000	20	21,604,000	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Orang	12	215,394,300	12	245,933,730	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	25	1,000,000	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	5	1,000,000	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	1,000,000	20	1,100,000	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	110	21,500,000	110	23,650,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	1	1,000,000	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	6,756,800	12	7,432,480	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	1,000,000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	1,000,000	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan /atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV /AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	1,000,000	
			Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	1,000,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	1,000,000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	1,000,000	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	3,590,000	4	3,949,000	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	182,547,500	3	200,802,250	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2	%	28.48	515,906,100	28.48	567,496,710	
			Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Orang	10	25,198,500	10	27,718,350	
			Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	2,701,400	10	2,971,540	
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	3,269,400	10	3,596,340	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	77	19,227,700	77	21,150,470	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terupdatenya Data Fakir miskin	dokumen	1	490,707,600	1	539,778,360	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	1,010,996	287,268,600	1,010,996	315,995,460	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Keluarga	210,589	143,290,600	210,589	157,619,660	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga	33	50,000,000	33	55,000,000	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	5	10,148,400	5	11,163,240	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%	100	74,093,900	100	81,503,290	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	25,741,700	100	28,315,870	
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	7,500,000	50	8,250,000	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	10,000,000	25	11,000,000	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	3,113,400	3	3,424,740	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	2,829,400	50	3,112,340	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	2,298,900	10	2,528,790	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiap siagaan bencana	desa	4	48,352,200	4	53,187,420	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	10,724,400	1	11,796,840	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37	37,627,800	37	41,390,580	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.	%	100	34,903,600	100	38,393,960	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	34,903,600	100	38,393,960	
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7,688,300	1	8,457,130	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	1	6,215,300	1	6,836,830	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	21,000,000	1	23,100,000	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender			IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Nilai	82,60	500,000,000	82,60	590,961,000	
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan		Indeks PUG	Nilai	0,81 Utama	500,000,000	0,81 Utama	590,961,000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5.4	165,000,000	5.4	181,500,000	
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	85	115,000,000	85	126,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	1	55,000,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Dokumen	2	35,000,000	2	38,500,000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40	30,000,000	40	33,000,000	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	0,06	25,000,000	0,06	27,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	20	25,000,000	20	27,500,000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52	25,000,000	52	27,500,000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	25,000,000	50	27,500,000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%	100	135,000,000	100	148,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%	100	100,000,000	100	110,000,000	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	100	25,000,000	100	27,500,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	50	75,000,000	50	82,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	84,30	35,000,000	84,30	38,500,000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	30,000,000	1	33,000,000	
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	50	5,000,000	50	5,500,000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pernikahan usia anak	%	4,75	55,000,000	4,75	60,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	%	100	30,000,000	100	33,000,000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	30	10,000,000	30	11,000,000	
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	14	10,000,000	14	11,000,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	10,000,000	1	11,000,000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	100	20,000,000	100	22,000,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	22	10,000,000	22	11,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	7,000,000	33	7,700,000	
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3,000,000	1	3,300,000	
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	orang	100	5,000,000	100	5,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	15	5,000,000	15	5,500,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%	81.48	20,000,000	81.48	22,000,000	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	37,50	20,000,000	37,50	22,000,000	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	10,000,000	1	11,000,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	1	11,000,000	
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak		Indeks KLA	Nilai	740 Nindya	125,000,000	740 Nindya	137,500,000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	27.03	125,000,000	27.03	137,500,000	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	%	63,30	85,000,000	63,30	93,500,000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	25	5,000,000	25	5,500,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	80,000,000	3	88,000,000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52.43	40,000,000	52.43	44,000,000	
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	10,000,000	60	11,000,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	1	11,000,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	10,000,000	3	11,000,000	
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	1	11,000,000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	%	100	0	100	40,961,000	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%	0	0	0	14,764,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	0	40	10,175,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	4,589,000	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%	0	0	0	26,197,000	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	20	11,906,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	0	0	10	6,399,000	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	3,000,000	
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	4,892,000	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	Menurunkan angka kelahiran			TFR	Angka	2,48	12,688,582,200	2,48	13,957,440,420	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu		ASFR (15-49 tahun)	Angka	35,00	609,503,600	35,00	670,453,960	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%	35,00	609,503,600	35,00	670,453,960	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/ pengawasan serta pelaporan KKBP	%	100	609,503,600	100	670,453,960	
			Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan	1	609,503,600	1	670,453,960	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Modern CPRm	%	23,00	11,701,835,900	23,00	12,872,019,490	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	%		5,200,000		5,720,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	5,200,000	1	5,720,000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB	%	100	853,200,000	100	938,520,000	
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	853,200,000	1	938,520,000	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%	70,26	10,836,663,900	70,26	11,920,330,290	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6	15,445,000	6	16,989,500	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	400	28,365,000	400	31,201,500	
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	15,780,000	1	17,358,000	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	600	48,800,000	600	53,680,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	14	10,636,663,900	14	11,700,330,290	
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Apsektor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	80	91,610,000	80	100,771,000	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	%	100	6,772,000	100	7,449,200	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	5,000,000	2	5,500,000	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Kb yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana)di Kampung KB	Kampung	237	1,772,000	237	1,949,200	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	%	85,84	377,242,700	85,84	414,966,970	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	%	100	329,372,700	100	362,309,970	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	51	2,002,700	51	2,202,970	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	9,813	21,750,000	9,813	23,925,000	
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	27,360,000	6	30,096,000	
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	138	198,588,000	138	218,446,800	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	222	54,432,000	222	59,875,200	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	25,240,000	1	27,764,000	

No.	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kecamatan yang difasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	%	100	47,870,000	100	52,657,000	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	14	47,870,000	14	52,657,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terutama masyarakat, aparatur pemerintah desa/kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan, Lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, lembaga yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun Dinas / Instansi terkait serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai sasaran Renja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya kohesivitas dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi maupun lintas instansi dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya serta pihak terkait berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya, Renja Perangkat Daerah ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Untuk mengupayakan kohesivitas, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Bidang dan Sekretariat membuat rencana kerja tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Uraian rencana penggunaan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan berupa kerangka regulasi dan anggaran sesuai dengan kewenangannya;
- b. Masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan, pendanaan, dan berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan dan melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam membuat rencana kerja masing-masing Bidang dan Sekretariat wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum konsultasi publik, dengar pendapat dan forum lintas pelaku sesuai kebutuhan.
- d. Pada akhir tahun 2022 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran dalam APBD serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
- e. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melakukan pemantauan dan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Selanjutnya Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja ini. Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memberi dukungan Rencana Kerja ini agar program/kegiatan dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Disamping itu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, dimana pada tahun 2022 akan terus menyempurnakan beberapa hal yang terkait dengan inovasi yang telah ada seperti :

a. Inovasi di urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah menggalakan program keluarga berencana yang kemudian di jabarkan dalam beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang membuat beberapa inovasi terkait pencegahan stunting, yaitu :

- 1) Penyusunan grand design parameter kependudukan
- 2) KB Online

b. Inovasi di Urusan Sosial

- 1) Membuat aplikasi single data kemiskinan
- 2) Membuat pusat layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

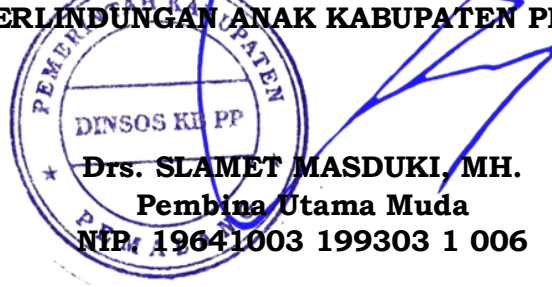
c. Inovasi di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Dukungan terhadap kebutuhan fisik bagi anak yatim/piatu/yatim piatu yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19
- 2) Dukungan psikososial dan pengasuhan bagi anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19
- 3) Dukungan berkelanjutan pendidikan bagi mereka

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomondir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 yang akan dituangkan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.

Pemalang, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG,**



Drs. SLAMET MASDUKI, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006